



Multilateral Meeting

***Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM**

Tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi
Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 6 September 2021



Outline

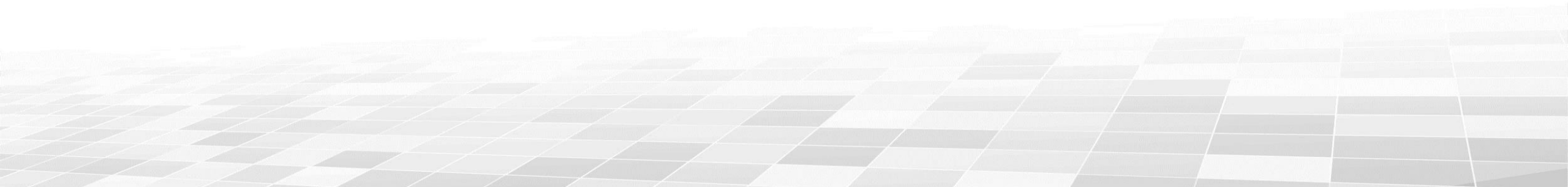
Tujuan Pertemuan

***Summary Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM**

Potensi Intervensi, Rantai Nilai, dan Isu Terkait Komoditas Sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM

Rincian Output K/L dan Proyek BUMN yang dapat Mendukung Pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM untuk Komoditas Sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan Pertemuan





Tujuan Pertemuan



Memperoleh gambaran terkait kondisi terkini dari pengelolaan komoditas dan pengembangan UMKM di setiap lokasi pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM.

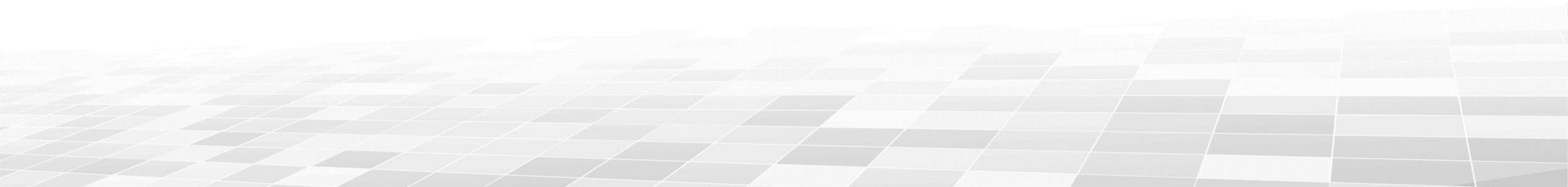


Mendapat informasi terkait kebutuhan intervensi yang masih diperlukan dalam rangka pengelolaan komoditas dan pengembangan UMKM di setiap lokasi pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM.



Menajamkan kembali bentuk komitmen dan memperjelas peran setiap Kementerian/Lembaga dan BUMN yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM di setiap lokasi.

Summary Major Project
Pengelolaan Terpadu UMKM





Pengelolaan Terpadu dalam PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM



Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan melalui:

Pendirian/Legalisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran perizinan berusaha2. Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi ekspor3. Fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses pembiayaan2. Imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga3. Penjaminan kredit modal kerja4. Penyaluran dana bergulir5. Bantuan permodalan6. Bentuk pembiayaan lain
Penyediaan Bahan Baku	<ol style="list-style-type: none">1. Membuka akses penyediaan bahan baku/penolong2. Memastikan ketersediaan bahan baku/penolong
Proses Produksi	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasarana2. Peningkatan kompetensi SDM3. Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster4. Fasilitasi desain produk dan kemasan, citra produk, desain/konten toko online5. Pembinaan dalam proses fabrikasi produk
Kurasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar2. Seleksi dan penilaian terhadap usaha mikro dan kecil
Pemasaran Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan2. Fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri3. Pengembangan kapasitas logistik4. Literasi digital dan nondigital5. Pengembangan aggregator bisnis online

1. Sarana dan Prasarana:

- a. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi
- b. mesin dan peralatan produksi
- c. sarana pendukung lain

2. Peningkatan kompetensi SDM:

- a. pendidikan
- b. pelatihan
- c. magang
- d. pendampingan



Struktur Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM



Outcome/
Impact

1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal meningkat dari 24,33% pada 2019 menjadi 27,80% pada tahun 2022
2. Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada 2019 menjadi 3,00% pada tahun 2022
3. Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,30% pada tahun 2022

Output

1. Produksi nilam meningkat menjadi 379 ton pada tahun 2022 (Aceh)
2. Penggunaan bahan baku rotan meningkat menjadi 12.000 ton pada tahun 2022 (Jawa Tengah)
3. Produksi biofarmaka (jahe) meningkat menjadi 3.410,9 ton pada tahun 2022 (Kalimantan Timur)
4. Produksi daging sapi meningkat menjadi 3701,3 ton di tahun 2022 (NTT)
5. Produksi kelapa meningkat menjadi 264,4 ton pada tahun 2022 (Sulawesi Utara)

Sub-Major
Project

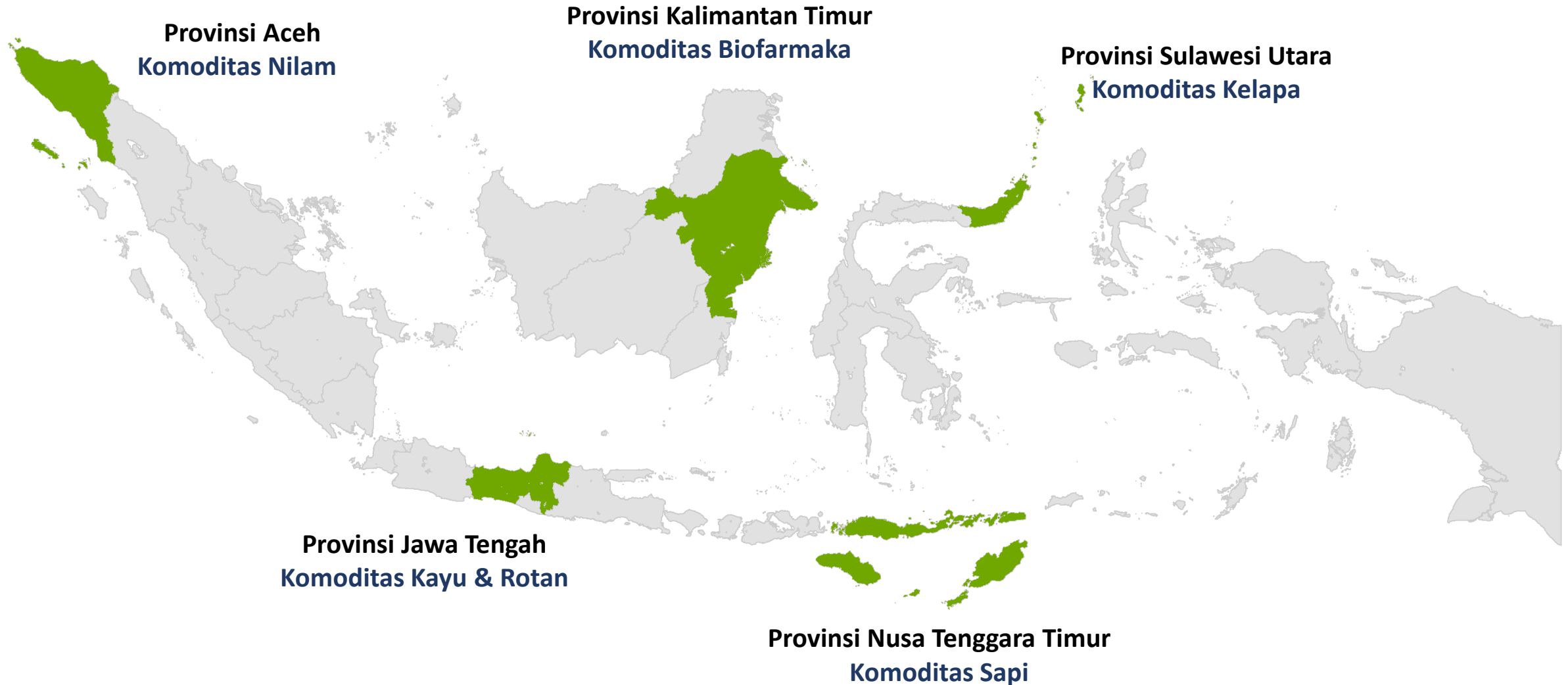


Ruang
Lingkup &
Sub-Ruang
Lingkup

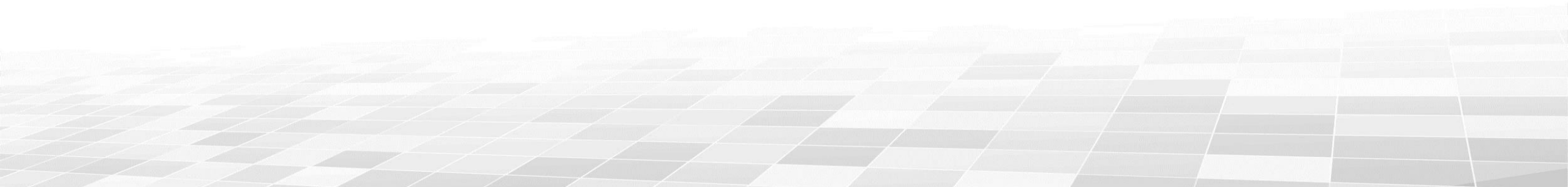




Komoditas dan Lokasi Major Project Pengelolaan UMKM Terpadu Tahun 2022



**Potensi Intervensi, Rantai Nilai, dan Isu Terkait
Komoditas Sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
pada *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM**





Potensi Intervensi dan Isu Komoditas Sapi di Nusa Tenggara Timur

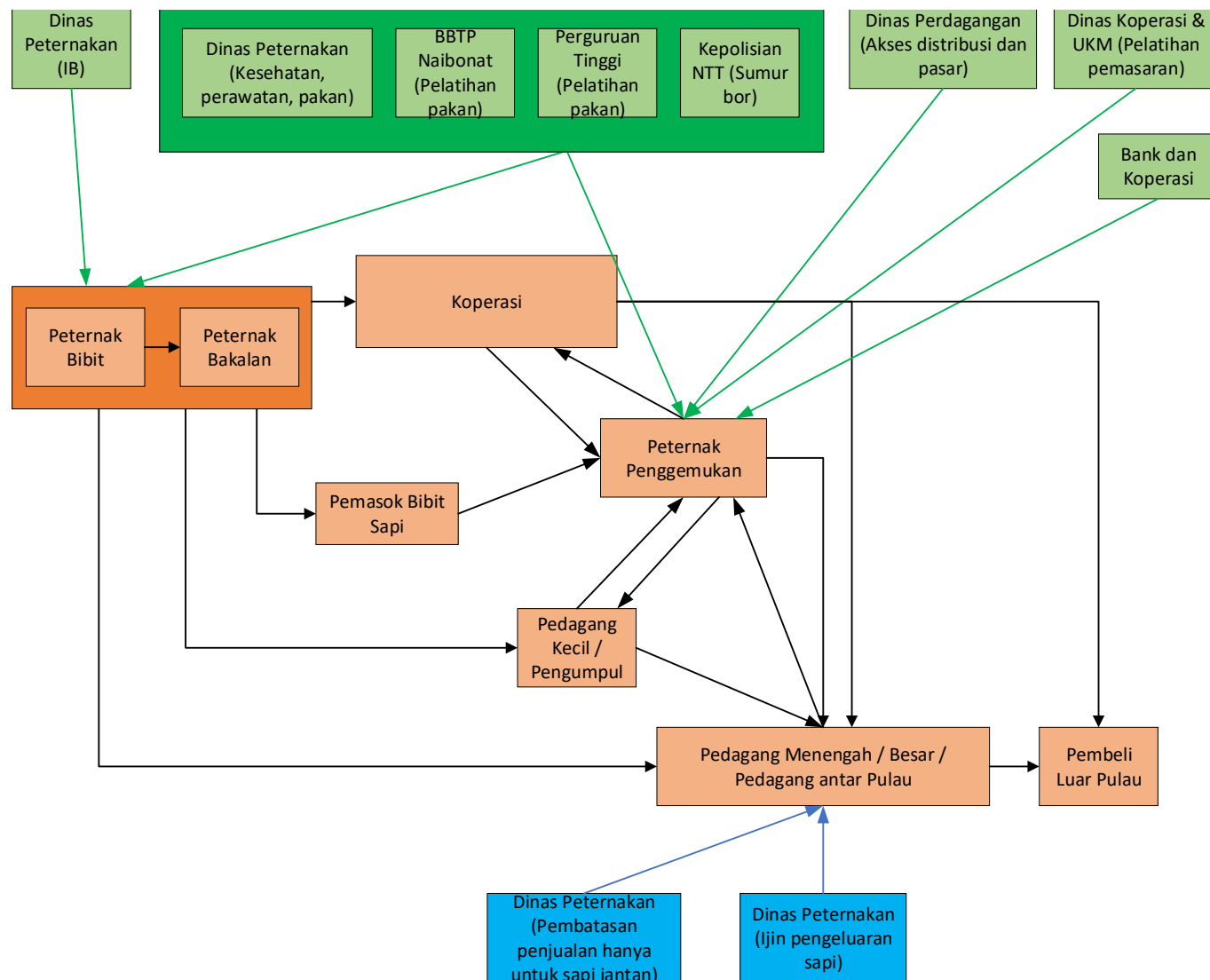
- Akses air di beberapa daerah sulit dijangkau.
- Pakan dari pohon lamtoro sulit didapatkan ketika musim kering tiba.
- Bibit dan bakalan unggul belum tersedia.
- Bibit dan bakalan yang tersedia memiliki kondisi fisik yang kecil akibat *inbreeding*.
- Kandang yang digunakan belum memiliki standar yang baik.
- Peternak belum memiliki pengetahuan terkait kesehatan dan proses penggemukan yang efektif dan efisien.
- Peternak belum memiliki keahlian untuk mengolah pakan yang dapat disimpan untuk digunakan ketika musim kering tiba.
- Banyak peternak lebih menyukai sistem taksir ketika akan menjual sapi karena belum terbiasa dengan sistem timbang.

Masalah Utama: Sulitnya pakan berkualitas khususnya di musim kering

Usulan Intervensi: Fasilitas rumah produksi Bersama (RPH) serta pasokan pakan ternak yang berkelanjutan



Rantai Nilai Komoditas Sapi di Nusa Tenggara Timur



- Nusa Tenggara Timur
- Komoditas: Sapi
- Lokasi: Kupang, Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan

Layanan Pendukung:

Dinas Peternakan | Dinas Koperasi | Dinas Perdagangan | BBPT Baibonat | Poltek Pertanian | Undana | Koperasi

Pelaku Pasar

Peternak | Koperasi | Pemasok bibit sapi | Pedagang kecil | Pedagang menengah/besar | Peternak Penggemukan | Pembeli Luar Pulau

Permasalahan

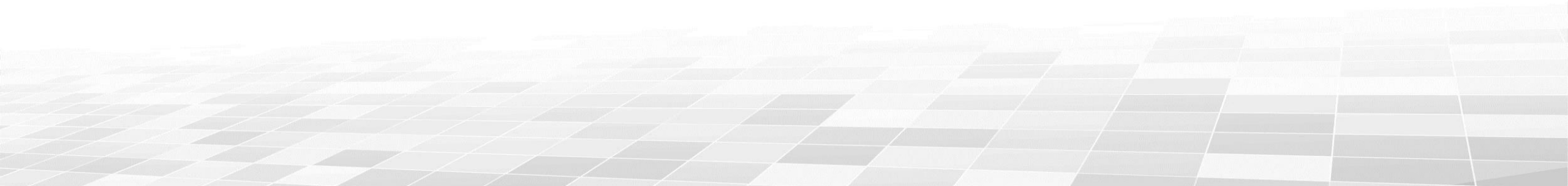
Ketersediaan pakan dan air minum

Alat transportasi pakan

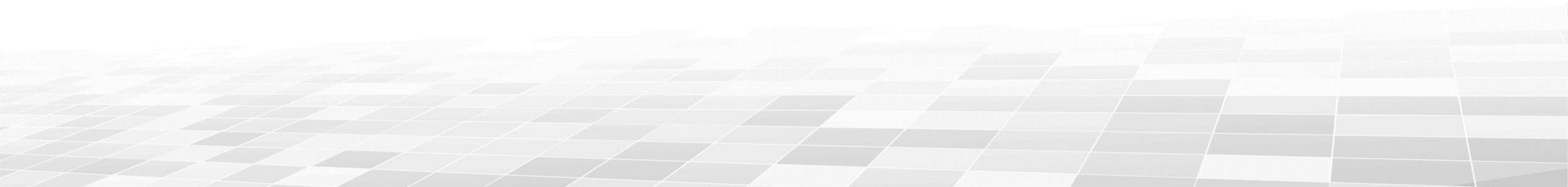
Penyakit hewan

Pemasaran

Terima Kasih



**Rincian Output K/L dan Proyek BUMN yang dapat
Mendukung Pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan
Terpadu UMKM untuk Komoditas Sapi
di Provinsi Nusa Tenggara Timur**



Kementerian Desa PDTT (1/2)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Pengembangan BUMDesa	26.750	500	Badan Usaha	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur , Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku	Kemendes PDTT	Penyediaan Akses Pembiayaan	Bantuan Permodalan	
2	Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Bersama	7.025	72	Badan Usaha	Kabupaten Aceh Timur, Toba, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Musi Rawas, Banyuasin, Tulang Bawang, Mesuji, Pesisir Barat, Bangka Selatan, Karimun, Sukabumi, Magelang, Kendal, Banyuwangi, Pamekasan, Klungkung, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumba Timur, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur , Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kotawaringin Barat, Banjar, Barito Kuala, Kutai Timur, Berau, Bulungan, Nunukan, Minahasa Utara, Morowali, Poso, Buol, Tojo Una Una, Sigi, Barru, Bone, Pinrang, Luwu Timur, Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, Mamuju, Mamuju Tengah, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Merauke, Nabire, Boven Digoel, Waropen, Kota Jayapura	Kemendes PDTT	Penyediaan Akses Pembiayaan	Bantuan Permodalan	

Kementerian Desa PDTT (2/2)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
3	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ekonomi	4.740	81	Kelompok Masyarakat	Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, Nias, Toba, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, Bungo, Banyuasin, Tulang Bawang, Mesuji, Bangka Selatan, Karimun, Sukabumi, Magelang, Kendal, Banyuwangi, Pamekasan, Klungkung, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Alor, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Malaka, Mempawah, Kubu Raya, Paser, Bulungan, Nunukan, Minahasa Utara, Poso, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una Una, Barru, Bone, Wajo, Pinrang, Luwu Utara, Konawe, Konawe Selatan, Wakatobi, Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Sula, Fak Fak, Teluk Wondama, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Merauke, Nabire, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Keerom, Waropen, Nduga, Kota Jayapura	Kemendes PDTT	Penyediaan Akses Pembiayaan	Bantuan Permodalan	
4	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	750	1	Kelompok Masyarakat	Pusat	Kemendes PDTT	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	

Kementerian Perindustrian (1/3)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	4.900	98	Industri	Pusat	Kemenperin	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitas Pemasaran	
2	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	12.500	192	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
3	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	9.000	161	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
4	Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitas	8.215	14	Kelompok Masyarakat	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
5	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	2.707	44	Industri	Pusat	Kemenperin	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitas Pemasaran	
6	Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	6.850	20	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
7	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	5.500	28	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	

Kementerian Perindustrian (2/3)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
8	Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitas	3.500	8	Kelompok Masyarakat	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
9	Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	2.000	50	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Desain Produk dan Kemasan	
10	Layanan Desain dan Kemasan	2.000	100	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Desain Produk dan Kemasan	
11	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM	1.500	1000	Industri	Pusat	Kemenperin	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	
12	Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL))	1.650	300	Orang	Pusat	Kemenperin	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
13	Pengembangan Sektor Industri Aneka	5.633	2	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	Kemenperin	Regulasi dan Pendataan UMKM	Regulasi KUMKM	
14	Dukungan Penumbuhan Wirausaha Baru dan Pengembangan IKM di Lingkungan Pondok Pesantren	689	9	Industri	Pusat	Kemenperin	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Pembinaan Fabrikasi Produk UMK	

Kementerian Perindustrian (3/3)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
15	IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM	1.500	1.000	Industri	Pusat	Kemenperin	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	

Badan Standarisasi Nasional

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Bimbingan teknis kepada UMKM	1.465	200	UMKM	Pusat	BSN	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	
2	Sosialisasi kepada Penerap Standar Nasional Indonesia	1.098	3000	Orang	Pusat	BSN	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
3	Bimbingan Teknis Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	917	30	Lembaga	Pusat	BSN	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Mahasiswa menjalankan wirausaha	24.849	3000	Mahasiswa	Koordinasi Pusat	Kemendikbudristek	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
2	SMK yang Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	22.090	240	Lembaga	Pusat	Kemendikbudristek	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	
3	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	90.543	16676	Orang	Pusat	Kemendikbudristek	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	

Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Adopsi teknologi digital UMKM	35.000	7000	UMKM	10 Kawasan Pariwisata Prioritas: Malang (Jawa Timur), Surakarta dan Semarang (Jawa Tengah), Karo (Sumatera Utara), Yogyakarta (DI Yogyakarta), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur) , Bangka Belitung, Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), Minahasa (Sulawesi Utara)	Kemenkominfo	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Agregator Bisnis Online	

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan	2.650	11.000	Orang	Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara	KPPPA	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
2	SDM pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang KGPA	700	1.800	Orang	Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara	KPPPA	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
3	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan	500	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	Aceh, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara	KPPPA	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	

Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	4.500	300	Orang	34 Provinsi	Kemenpora	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	

Kementerian Ketenagakerjaan

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Tenaga Kerja Mandiri Pemula	200.000	40.000	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
2	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Pemula	80.000	40.000	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
3	Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	27.000	1.800	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
4	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	6.570	1.800	Orang	34 Provinsi (Pusat)	Kemenaker	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	2.450	1.200	Orang	Kota Pematang Siantar (150), Kota Pekanbaru (150), Kab. Bogor (150), Kab. Majalengka (150), Kota Bogor (150), Kota Kupang (150), Kota Samarinda (150), Kota Makassar (150)	KLHK	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	
2	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	8.400	42	Kelompok Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota (1), Kab. Kerinci (1), Kab. Musi Rawas (1), Kab. Lampung Barat (4), Kab. Bandung Barat (1), Kab. Blitar (5), Kab. Jembrana (2), Kab. Ngada (6), Kab. Ketapang (1), Kab. Kapuas Hulu (5), Kab. Hulu Sungai Tengah (1), Kab. Bantaeng (1), Kab. Barru (1), Kab. Sidenreng Rappang (5), Kab. Kepulauan Aru (1), Kab. Seram Bagian Barat (2), Kota Ambon (1), Kab. Halmahera Barat (2), Kota Ternate (1)	KLHK	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	

Kementerian Agama

NO	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Sertifikat Halal Non UMK	6.950	7.970	Produk/Sertifikat	Pusat	Kemenag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
2	Sertifikat Halal UMK	25.050	25.000	Produk/Sertifikat	34 Provinsi	Kemenag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	



Kementerian Pertanian

No	RO	Alokasi (Rp Juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Wirausahawan Muda Pertanian	21.620	765	Kelompok Masyarakat	Kota Medan, Kab. Banyuasin, Kota Bogor, Kab. Magelang, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kab. Tangerang, Kab. Kupang, Kota Banjarbaru, Kab. Gowa, Kab. Manokwari	Kementan	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	

Kementerian Perdagangan

No	RO	Alokasi (RP juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Fasilitasi Pengembangan Merek	1.000	25	Badan Usaha	Belum ditentukan	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
2	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	750	200	Badan Usaha	Belum ditentukan	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
3	Fasilitasi Sertifikasi Produk Ekspor	3.250	40	Badan Usaha	Belum ditentukan	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi	
4	Pengembangan Desain melalui Indonesian Design Development Center	4.500	100	Produk	Jakarta	Kemendag	Kurasi dan Standardisasi Produk	Kurasi Produk Unggulan	
5	Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar	5.000	1500	UMKM	5 Provinsi (Pusat)	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	
6	Promosi Makanan dan Minuman Sehat Nusantara	5.000	1	Promosi	Jakarta	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
7	Export Coaching Program	6.329	300	UKM	Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Mataram, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Pontianak, Serang	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
8	Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	10.000	500	UMKM	20 Provinsi (Pusat)	Kemendag	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
9	Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	2.000	1.000	UMKM	6 Provinsi (Pusat)	Kemendag	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Kemitraan Usaha Nasional	8.000	25	UMKM	Pusat	Kemenves/ BKPM	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	
2	Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	27.000	70	Badan Usaha	Pusat	Kemenves/ BKPM	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	003 – Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan	218	1	Perkara	Pusat	KPPU	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	
2	002 - Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	307	2	Badan usaha	Pusat	KPPU	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	

Kementerian Perhubungan (1/3)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap IV (Termasuk Supervisi)	32.500	1	Unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
2	Rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Likupang - Prioritas Nasional	39.326	1	Unit	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
3	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo Kab. Ende - Prioritas Nasional	15.000	1	Unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
4	Pengembangan Bandar udara H Hasan Aroeboesman - PN	100.000	1	unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
5	Pengembangan Bandar Udara umbu Mehang Kunda - PN	80.500	1	unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
6	Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Tahap III - PN	100.000	1	unit	Provinsi Kalimantan Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	

Kementerian Perhubungan (2/3)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
7	Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondow - PN	121.000	1	unit	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
8	Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh - PN	16.725	1	unit	Provinsi Aceh	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
9	Pengembangan Bandar Udara Dewadaru	50.000	1	unit	Provinsi Jawa Tengah	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
10	Pengembangan Pelabuhan Laut Seba	52.000	1	unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
11	Pembangunan Fasilitas pelabuhan Laut Tahuna	2.700	1	unit	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
12	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang	25.000	1	unit	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	

Kementerian Perhubungan (3/3)

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
13	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pulau Banyak	19.000	1	Unit	Provinsi Aceh	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
14	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Atapupu	83.500	1	Unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	
15	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Baa	15.000	1	unit	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenhub	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Kapasitas Logistik	

Proyek Badan Usaha Milik Negara

No	RO	Alokasi (Rp juta)	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
1	Pengembangan Aplikasi Warung Pangan untuk UMKM	50.200				BGR	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	
2	Penjaminan KUR UMKM-K	3.500.000				BPUI, Jamkrindo, Askrindo	Penyediaan Akses Pembiayaan	Bantuan Permodalan	
3	Telkom Digital Venture	7.500.000				Telkom	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	



Kementerian Koperasi dan UKM (1/19)

Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4442.QDF	002-Koperasi yang difasilitasi melakukan kemitraan	Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	
		003-Koperasi yang dikembangkan Jaringan Usahanya	Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
		004-Korporatisasi Petani dan Nelayan Melalui Koperasi	Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	



Kementerian Koperasi dan UKM (2/19)

Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	5615.SCF	001- Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang diberikan Pelatihan	Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	



Kementerian Koperasi dan UKM (3/19)

Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2746.QDF	001-Koperasi yang mendapatkan Dukungan Permodalan dan Penjaminan	Pusat, Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	
		002-Koperasi yang mendapatkan akses dan skema pembiayaan	Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	



Kementerian Koperasi dan UKM (4/19)



Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah (1/2)

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2751.QDG	001-Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	
		002-UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Kupang, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Pengembangan Agregator Bisnis Online	
		003-Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat	Pusat	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
		004-Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang diperluas dan dibentuk	Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Asia Pasifik	Kurasi dan Standardisasi Produk	Kurasi Produk Unggulan	



Kementerian Koperasi dan UKM (5/19)



Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah (2/2)

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2751.QDJ	001-Kemitraan Usaha Startup yang diperluas dan dibentuk	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	



Kementerian Koperasi dan UKM (6/19)



Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro

Kode Progra m	Kode Kegiatan/KR O	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2739.QDG	001-Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	
		002-Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan	Kab. Aceh Besar , Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi Jawa Timur, Kota Kupang , Kota Balikpapan , Kab. Minahasa Selatan	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Kemitraan Usaha	
		003-Skema/Sistem Jaringan Pemasaran untuk 10 Kelompok/Klaster Usaha Mikro	Kab. Aceh Besar , Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi Jawa Timur, Kota Kupang , Kota Balikpapan , Kab. Minahasa Selatan	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	
		004-Usaha Mikro yang difasilitasi perluasan jangkauan pemasaran melalui e-commerce	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Fasilitasi Pemasaran	



Kementerian Koperasi dan UKM (7/19)



Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode Program	Kode Kegiatan /KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2763.QDJ	001-Start-Up yang difasilitasi Akses Investasi	Provinsi Aceh , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	
	2763.QDG	001-UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	Provinsi Aceh , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	
		002-UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	



Kementerian Koperasi dan UKM (8/19)

Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2764.SAA	001-UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika	34 Provinsi	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	
	2764.SBE	001-UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi	Provinsi Aceh , Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Maluku, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Selatan	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	
		002-Pembina Aparatur / Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
	2764.SCC	001-UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif	Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	
	2764.SCF	001-UKM/Start-Up yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku	Pendampingan SDM UMKM	Literasi Digital dan Non-Digital	



Kementerian Koperasi dan UKM (9/19)



Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB dan WA	4445.QDG	001-USaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	Kab. Aceh Besar , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Kota Kupang , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan , Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua.	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	
		002-Kelompok/Klaster Usaha Mikro Unggulan mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha	Kab. Aceh Besar , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Balikpapan , Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	
		003-Kelompok/Klaster Usaha Mikro mendapatkan fasilitasi Standardisasi Kompetensi SDM Usaha Mikro	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Kota Kupang , Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/Training	



Kementerian Koperasi dan UKM (10/19)



Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4451.QDG	001-Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk	Bali, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, NTB (per Renja awal)	Kurasi dan Standardisasi Produk	Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi	



Kementerian Koperasi dan UKM (11/19)



Sekretariat Deputy Bidang Usaha Mikro

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
	4942.PEA	001- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Program	Pusat	Regulasi dan Pendataan UMKM	Pendataan KUMKM	Dihapus dari tagging MP



Kementerian Koperasi dan UKM (12/19)



LPDB-KUMKM

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2779.QAF	001-Koperasi Penerima Dana Bergulir	Pusat	Penyediaan Akses Pembiayaan	Dana Bergulir Pemerintah	
	2779.EBD	003-Layanan Perencanaan, Pelaporan dan Sosialisasi	Pusat	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	



Kementerian Koperasi dan UKM (13/19)



Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4446.Q DG	001-USaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	
	4446.U BA	001-Pemerintah Daerah yang mendapatkan pembinaan dalam Pengembangan Usaha Mikro	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	



Kementerian Koperasi dan UKM (14/19)



Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah

Kode Progra m	Kode Kegiatan /KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub- Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4450.PBF	001-Kebijakan sarana dan prasarana Factory Sharing UKM yang direkomendasikan	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat	Regulasi dan Pendataan UMKM	Regulasi KUMKM	
	4450.QD G	001-UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok	Kab. Aceh Besar , Provinsi Jawa Barat, Kab. Subang, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
		002-UKM/Sentra Yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	Kab. Aceh Besar , Kab. Subang, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/ Training	
	4450.QD J	001-Start-Up yang diperluas rantai pasok	Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Pendampingan SDM UMKM	Sertifikasi melalui Pelatihan/ Training	
	4450.RAI	001-UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Factory Sharing	Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	



Kementerian Koperasi dan UKM (15/19)



Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis

Kode Program	Kode Kegiatan/KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4454.QDB	001-Dunia Pendidikan, Industri dan Usaha yang diperkuat Perannya di Bidang Kewirausahaan	Pusat, Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	



Kementerian Koperasi dan UKM (16/19)



Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha

Kode Program	Kode Kegiatan/ KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4455.QDC	001-Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif	Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	
		002-Wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang Pembiayaan	Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua	Penyediaan Akses Pembiayaan	Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan	



Kementerian Koperasi dan UKM (17/19)



Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

Kode Program	Kode Kegiatan/K RO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	2757.QDC	001-Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitas konsultasi bisnis	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Sarana dan Prasarana Produksi	
		002-Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	



Kementerian Koperasi dan UKM (18/19)



Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Wirausaha

Kode Program	Kode Kegiatan /KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4456.QD B	001-Lembaga Inkubator Wirausaha yang dikembangkan	Pusat, Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	
	4456.QD J	001-Startup yang di fasilitasi inkubasi	Pusat, Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan	Pendampingan SDM UMKM	Pendampingan Wirausaha	



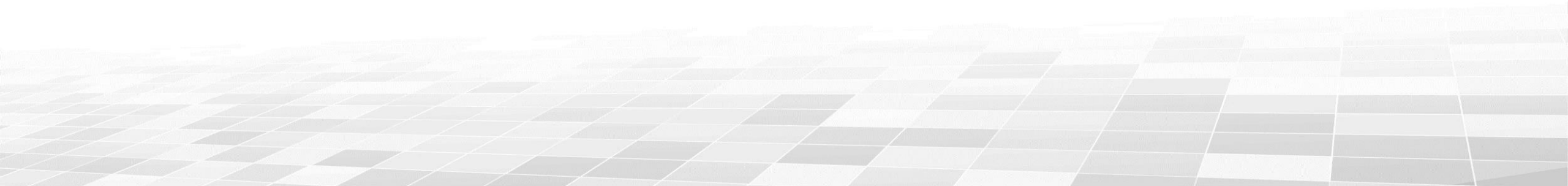
Kementerian Koperasi dan UKM (19/19)



Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha

Kode Program	Kode Kegiatan /KRO	RO	Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021)	Ruang Lingkup	Sub-Ruang Lingkup	Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi NTT (6 September 2021)
044.EB	4457.QMA	001-Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	Pusat	Regulasi dan Pendataan UMKM	Pendataan KUMKM	

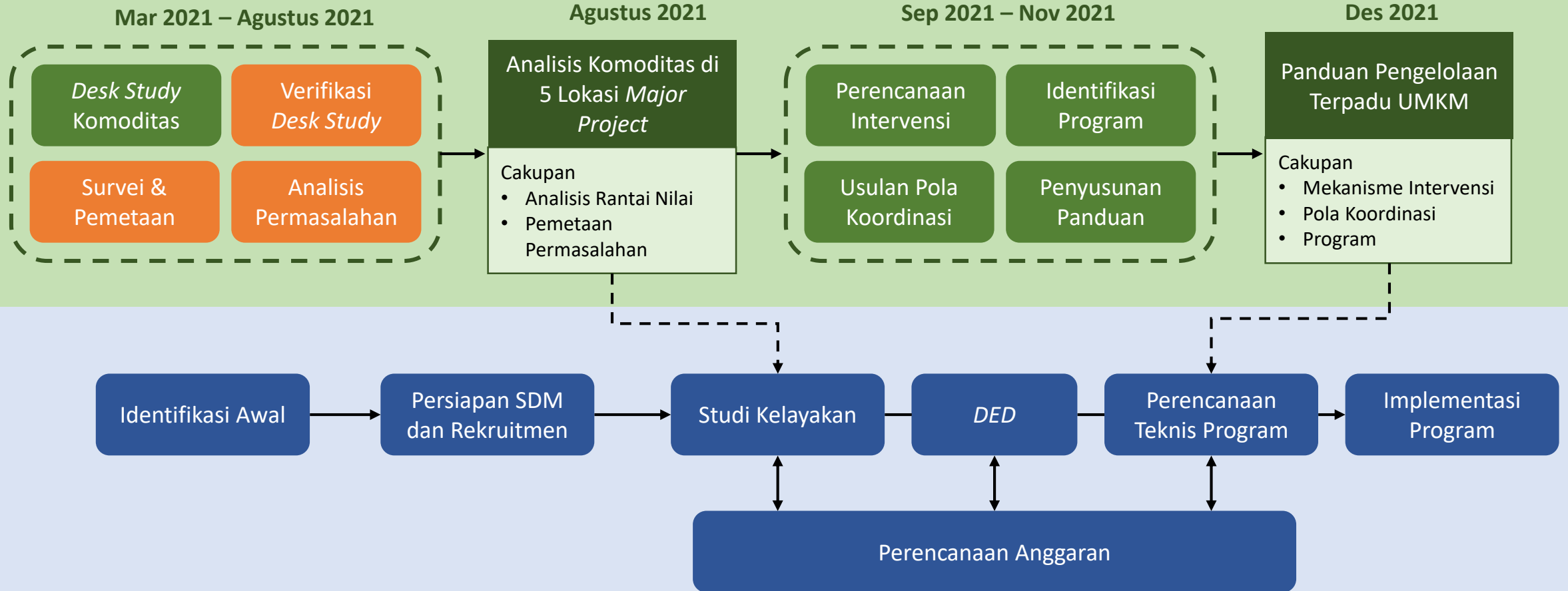
End of Document





Skema Pelaksanaan Studi Awal Pengelolaan Terpadu UMKM

Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian Koperasi dan UKM

-----> Output Kajian sebagai masukan untuk



Tahapan saat ini



Kemajuan Tahapan Kajian Tiap Lokasi *Major Project*

Lokasi	Komoditas	Desk Study	Survei & Pemetaan	Verifikasi Studi (M2-M4 Agustus)	Perencanaan Intervensi (Oktober)	Keterangan
Sulawesi Utara	Kelapa	V	V	X	X	Finalisasi hasil survei dan analisis
NTT	Sapi	V	V	X	X	Sedang berjalan, masih dilakukan survei
Jawa Tengah	Kayu/Rotan	V	X	X	X	Survei oleh <i>local enumerator</i> terkendala kebijakan PPKM
Kalimantan Timur	Biofarmaka	V	V	X	X	Pemetaan selesai, sedang dianalisis
Aceh	Nilam	V	X	X	X	Survei oleh <i>local enumerator</i> akan dimulai pada minggu ke-2 Agustus

Diperlukan informasi kemajuan pelaksanaan penyiapan *major project* oleh Kementerian KUKM

- Tim Koordinasi Pengelolaan Terpadu UMKM di KemenKUKM
- Sekretariat Pengelolaan Terpadu
- Kajian Kelayakan di tiap lokasi
- Penyusunan DED, dan sebagainya.

Referensi Dokumen yang Tersedia

- Kajian Kelayakan Usaha Melalui Kemitraan Strategis Komoditas Biofarmaka di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (2021)
- Kajian Identifikasi Potensi Pengembangan Kemitraan Strategis pada Komoditas Sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (2019-2020)
- Kajian Identifikasi Praktik Baik Kemitraan Strategis di Indonesia (2018-2019)